



Dari Kedatuan Ke Cumbava Rekonstruksi Historiografis Sumbawa

Ahmad Yamin

Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-01-07 Revised: 2026-02-13 Published: 2026-03-02 Keywords: <i>Sumbawa; Mandala of Power; Datua; Sultanate; Structural History.</i>	This study examines the historical dynamics and transformation of power on Sumbawa Island from prehistoric times to the formation of the sultanate. The primary focus is to position Sumbawa as an active historical actor in the Indonesian maritime network, not merely a chronological object. The study aims to analyze changes in power structures triggered by internal and external interactions. It uses qualitative-descriptive historical methods that include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The analysis is strengthened by the theory of the mandala of power, structural history, and circuits of power to avoid Javanese-centric or colonial-centric biases. Data sources include archaeological findings, oral traditions, the Nagarakretagama manuscript, and local manuscripts. Sumbawa's political foundations began with prehistoric ritual-genealogical leadership that developed alongside the integration of East Asian trade. Sumbawa's political existence was recognized in the Majapahit mandala system. Subsequently, the transformation from a chiefdom to a sultanate occurred gradually through a process of Islamization and the regional influence of Gowa-Tallo, while maintaining local customary structures as a core identity. Sumbawa's political history is an adaptive process that shaped the circuits of power unique to the Eastern Indonesian Archipelago. Through a critical historiography approach, this study provides a more inclusive and decentralized narrative of Indonesian history.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-01-07 Direvisi: 2026-02-13 Dipublikasi: 2026-03-02 Kata kunci: <i>Sumbawa; Mandala Kekuasaan; Kedatuan; Kesultanan; Sejarah Struktural.</i>	Penelitian ini mengkaji dinamika sejarah dan transformasi kekuasaan di Pulau Sumbawa dari masa prasejarah hingga terbentuknya kesultanan. Fokus utama adalah menempatkan Sumbawa sebagai aktor historis aktif dalam jaringan maritim Nusantara, bukan sekadar objek kronologi. Penelitian bertujuan menganalisis perubahan struktur kekuasaan yang dipicu oleh interaksi internal maupun eksternal. Menggunakan metode sejarah kualitatif-deskriptif yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Analisis diperkuat dengan teori mandala kekuasaan, sejarah struktural, dan sirkuit kekuasaan guna menghindari bias Jawa-sentris maupun kolonial-sentris. Sumber data mencakup temuan arkeologis, tradisi lisan, naskah Nagarakretagama, serta manuskrip lokal. Fondasi politik Sumbawa berawal dari kepemimpinan ritual-genealogis prasejarah yang berkembang seiring integrasi perdagangan Asia Timur. Eksistensi politik Sumbawa diakui dalam sistem mandala Majapahit. Selanjutnya, transformasi dari bentuk kedatuan menjadi kesultanan berlangsung secara gradual melalui proses islamisasi dan pengaruh regional Gowa-Tallo, dengan tetap mempertahankan struktur adat lokal sebagai identitas inti. Sejarah politik Sumbawa merupakan proses adaptif yang membentuk sirkuit kekuasaan khas Nusantara Timur. Melalui pendekatan historiografi kritis, kajian ini memberikan narasi sejarah Indonesia yang lebih inklusif dan desentralistik.

I. PENDAHULUAN

Pulau Sumbawa kerap diposisikan sebagai wilayah perifer dalam historiografi Nusantara yang cenderung berorientasi Jawa-sentris dan kolonial-sentris. Dalam banyak penulisan sejarah klasik, Sumbawa hanya muncul sebagai fragmen kecil dalam narasi besar Majapahit, perdagangan rempah, atau ekspansi kolonial Eropa. Padahal, pembacaan lintas sumber—arkeologi, catatan pelaut Tiongkok, teks Jawa Kuno, dan laporan

penjelajah Eropa menunjukkan bahwa Sumbawa memiliki kontinuitas sejarah politik yang panjang dan relatif otonom.

Sejak masa prasejarah, masyarakat Sumbawa telah mengembangkan sistem sosial-politik berbasis ritual, genealogis, dan penguasaan sakral atas tanah. Sistem ini kemudian dikenal sebagai kedatuan, yakni bentuk entitas politik lokal yang lahir dari dinamika internal masyarakat Tau Tana Samawa. Kedatuan tidak

berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara aktif dengan jaringan perdagangan dan kekuasaan regional.

Masuknya Sumbawa dalam orbit perdagangan Asia Timur tercermin dalam catatan pelaut dan penulis Tiongkok sejak abad ke-12-13, yang mengindikasikan peran pulau ini dalam sirkuit komoditas maritim. Selanjutnya, pengakuan terhadap entitas-entitas politik Sumbawa dalam *Nagarakretagama* (1365) menempatkan wilayah ini dalam sistem mandala Majapahit tanpa menghilangkan otonomi internal kedatuan-kedatuan lokal.

Transformasi paling signifikan terjadi pada abad ke-16-17, ketika globalisasi maritim dan islamisasi mendorong perubahan struktur kekuasaan dari kedatuan menuju kesultanan. Namun, perubahan ini bukanlah pemutusan sejarah, melainkan reartikulasi sistem kekuasaan, di mana kedatuan sebagai fondasi politik lokal mengalami institusionalisasi dalam kerangka Islam dan jaringan kekuasaan Nusantara Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya merekonstruksi sejarah Sumbawa secara sistemik dan kronologis untuk menunjukkan bahwa perubahan politik di pulau ini berlangsung secara evolutif dan berlapis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah kritis dengan perspektif sejarah struktural untuk membedah transformasi kekuasaan di Pulau Sumbawa secara diakronis. Adapun rincian metodologinya adalah sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif-historis yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus desain ini adalah merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui penelusuran fakta yang saling berkelindan dalam struktur sosial-politik. Pendekatan historiografi komparatif digunakan untuk membandingkan narasi dari berbagai sumber (lokal, Jawa, dan asing), sementara analisis struktural diterapkan untuk melihat perubahan dari bentuk *kedatuan* ke *kesultanan* sebagai sebuah proses evolusi sirkuit kekuasaan yang sistemik.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang mendalam terhadap berbagai jenis sumber untuk mencapai

triangulasi data. Tahapan pengumpulan data (heuristik) meliputi:

- a) Sumber Primer Tertulis: Penelusuran teks-teks kuno seperti naskah *Nagarakretagama* (1365), catatan perjalanan Tome Pires dalam *Suma Oriental*, serta laporan kronik dari pelaut dan pedagang Tiongkok (abad ke-12-13).
- b) Data Arkeologis: Penggunaan laporan hasil ekskavasi dan temuan material (situs megalitik, gerabah, dan artefak lainnya) untuk merekonstruksi masa prasejarah dan proto-sejarah Sumbawa.
- c) Sumber Sekunder: Penelaahan terhadap literatur historiografi nasional, jurnal internasional, dan manuskrip lokal yang telah ditransliterasi guna memperkaya konteks sosiopolitik wilayah Nusantara Timur.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui empat tahapan metodologi sejarah standar:

- a) Kritik Sumber (Verifikasi): Melakukan uji otentisitas (kritik eksternal) terhadap fisik sumber dan uji kredibilitas (kritik internal) terhadap isi informasi untuk memastikan validitas data sejarah.
- b) Interpretasi: Melakukan sintesis dan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Pada tahap ini, peneliti menggunakan teori mandala dan sirkuit kekuasaan untuk memaknai hubungan antara pusat-pusat kekuasaan lokal dengan entitas luar (Majapahit dan Gowa-Tallo).
- c) Analisis Struktural-Diakronis: Menghubungkan berbagai peristiwa politik dalam alur waktu untuk melihat pola perubahan jangka panjang (*longue durée*) dari masa prasejarah hingga masa Islam.
- d) Historiografi: Menyusun fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis menjadi narasi ilmiah yang sistematis, inklusif, dan lepas dari bias sentralistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fondasi Prasejarah dan Proto-Politik di Pulau Sumbawa

Jejak awal organisasi kekuasaan di Pulau Sumbawa dapat ditelusuri melalui temuan arkeologis yang menunjukkan adanya struktur sosial kompleks jauh sebelum munculnya catatan tertulis. Penelitian arkeologi di wilayah Batu

Tering, Ai Renung, dan Gunung Piring memperlihatkan keberadaan tradisi megalitik berupa kubur batu, sarkofagus, dan monumen ritus leluhur yang mengindikasikan diferensiasi sosial dan kepemimpinan ritual (Arifin, 2015; Simanjuntak, 2017).

Tradisi megalitik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi religius, tetapi juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Dalam masyarakat prasejarah Sumbawa, penguasaan terhadap ruang sakral dan ritus leluhur menjadi dasar otoritas politik. Pemimpin komunitas memperoleh legitimasi bukan dari kontrol teritorial, melainkan dari kemampuan mengelola hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Pola ini menunjukkan embrio sistem kekuasaan yang bersifat genealogis dan kosmologis.

Struktur proto-politik ini dapat dipahami sebagai cikal bakal kedatuan, yakni entitas politik lokal yang berakar pada Tau Tana Samawa. Kedatuan bukan produk pengaruh luar, melainkan hasil evolusi internal masyarakat Sumbawa dalam mengelola kekuasaan, sumber daya, dan kohesi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan sejarah struktural yang menekankan kesinambungan jangka panjang dalam pembentukan sistem politik lokal (Kartodirdjo, 1993).

Masuknya pengaruh Hindu-Buddha melalui jalur maritim Nusantara tidak menghapus struktur proto-politik tersebut. Sebaliknya, terjadi proses sinkretisme selektif, di mana simbol, estetika, dan konsep legitimasi kekuasaan baru diadaptasi ke dalam kerangka lokal. Hal ini memperkuat kapasitas kedatuan sebagai entitas politik yang adaptif dan resilien (Arifin, 2015). Dengan demikian, fondasi prasejarah Sumbawa memperlihatkan bahwa sebelum hadirnya negara, agama dunia, dan kolonialisme, masyarakat Samawa telah memiliki sistem kekuasaan yang terorganisasi. Kedatuan lahir sebagai ekspresi politik murni lokal, yang kemudian menjadi fondasi bagi transformasi sistem kekuasaan pada fase-fase sejarah berikutnya.

2. Sumbawa dalam Catatan Pelaut dan Pedagang Tiongkok

Keberadaan Sumbawa dalam jaringan perdagangan Asia Timur dapat ditelusuri

melalui catatan pelaut dan pedagang Tiongkok sejak abad ke-12. Meskipun nama "Sumbawa" tidak selalu disebut secara eksplisit, deskripsi wilayah di timur Jawa sebagai penghasil kayu sepong, kayu harum, dan hasil ternak sangat konsisten dengan kondisi ekologis Pulau Sumbawa (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Catatan Dinasti Song dan Yuan, seperti *Chu-fan-chi* karya Chau Ju-Kua, menunjukkan bahwa kawasan Nusa Tenggara telah menjadi bagian dari sirkuit perdagangan maritim internasional. Komoditas dari wilayah ini diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan perantara dan terhubung dengan pasar di Cina Selatan dan Asia Tenggara Daratan. Posisi Sumbawa dalam jalur ini menandakan peran aktif elite lokal dalam ekonomi regional.

Distribusi keramik Dinasti Song dan Yuan yang ditemukan di situs-situs kedatuan tua di Sumbawa memperkuat bukti keterlibatan elite lokal dalam perdagangan jarak jauh. Keramik bukan sekadar barang konsumsi, tetapi simbol status dan legitimasi sosial. Kepemilikan barang impor memperkuat posisi penguasa lokal dalam struktur kekuasaan internal (Simanjuntak, 2017).

Partisipasi dalam jaringan perdagangan ini memperlihatkan bahwa kedatuan Sumbawa telah memiliki kapasitas diplomatik dan ekonomi sebelum integrasi ke dalam sistem kekuasaan Jawa maupun Islam. Elite kedatuan berfungsi sebagai mediator antara dunia luar dan komunitas lokal, sekaligus mengendalikan distribusi sumber daya strategis.

Dengan demikian, catatan Tiongkok menegaskan bahwa Sumbawa bukan wilayah terisolasi, melainkan simpul aktif dalam jaringan maritim Asia. Kedatuan tampil sebagai entitas politik-ekonomi yang otonom, yang mampu memanfaatkan perdagangan global untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas internalnya.

3. Representasi Sumbawa dalam *Nagarakretagama*

Kakawin *Nagarakretagama* (1365 M) karya Mpu Prapanca merupakan sumber tertulis tertua yang secara eksplisit menyebutkan entitas politik di Pulau Sumbawa. Penyebutan wilayah seperti Taliwang, Dampo, Sapi, dan Bima menunjukkan

bahwa kawasan ini telah masuk ke dalam horizon geopolitik Nusantara abad ke-14 (Pigeaud, 1960).

Dalam kerangka teori mandala, penyebaran tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti kontrol administratif langsung Majapahit. Sebaliknya, Majapahit berfungsi sebagai pusat simbolik yang mengikat berbagai entitas politik otonom dalam jaringan legitimasi dan loyalitas longgar (Wolters, 1999). Kedatuan di Sumbawa tetap mempertahankan kedaulatan internalnya. Penting dicatat bahwa *Nagarakretagama* menyebut entitas-entitas mikro, bukan satu nama geografis tunggal "Sumbawa". Hal ini menunjukkan bahwa identitas politik pada masa tersebut bersifat plural dan berbasis kedatuan. Pengakuan Majapahit justru mempertegas eksistensi politik lokal, bukan meniadakannya.

Representasi ini juga menegaskan bahwa kedatuan Sumbawa memiliki posisi strategis dalam sistem regional Majapahit, baik dari sisi ekonomi maritim maupun geopolitik. Sumbawa bukan periferi pasif, melainkan bagian integral dari jaringan kekuasaan Nusantara Timur (Hägerdal, 2012). Dengan demikian, *Nagarakretagama* berfungsi sebagai bukti historiografis penting bahwa kedatuan di Sumbawa adalah entitas politik sah yang diakui secara eksternal. Hal ini memperkuat argumen bahwa kedatuan merupakan fondasi politik Tau Tana Samawa sebelum hadirnya kesultanan dan kolonialisme.

4. Sirkuit Kekuasaan: Transformasi Kedatuan menuju Kesultanan

Transformasi dari kedatuan menuju kesultanan pada awal abad ke-17 merupakan perubahan sistemik dalam sejarah politik Sumbawa. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sirkuit kekuasaan yang melibatkan islamisasi, diplomasi regional, dan restrukturisasi institusi politik (De Graaf, 1970). Pengaruh Kesultanan Gowa Tallo berperan penting dalam proses tersebut. Islamisasi di Sumbawa berlangsung bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan politik, sehingga agama berfungsi sebagai sumber legitimasi baru yang memperkuat otoritas penguasa lokal (Azra, 2013). Namun, islamisasi ini tidak menghapus

struktur kedatuan. Dalam perspektif sirkuit kekuasaan, kesultanan menyerap dan menginstitusionalisasikan elemen-elemen kekuasaan kedatuan: genealogis, adat, dan kosmologis. Gelar "Sultan" menggantikan "Datu", tetapi mekanisme legitimasi lokal tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam kerangka syariat dan hukum Islam (Hasanuddin, 2018).

Kesultanan Sumbawa kemudian berkembang sebagai sistem kekuasaan yang lebih terpusat dan stabil, namun tetap berbasis pada adat Tau Tana Samawa. Lembaga-lembaga adat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan Sultan, menunjukkan kesinambungan antara sistem lama dan baru (Said, 2020). Dengan demikian, transformasi kedatuan menuju kesultanan bukanlah diskontinuitas sejarah, melainkan perubahan kualitas sistem kekuasaan. Kedatuan tetap menjadi inti politik lokal, sementara kesultanan berperan sebagai bentuk institusional lanjut yang memungkinkan integrasi Sumbawa ke dalam jaringan politik Islam dan dunia modern awal.

B. Pembahasan

1. Relasi Mandala: Sumbawa dalam Jaringan Politik Nusantara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebutan wilayah Sumbawa dalam *Nagarakretagama* bukanlah bukti aneksasi administratif, melainkan pengakuan atas eksistensi politik lokal. Hal ini selaras dengan Teori Mandala dari O.W. Wolters (1999) dan Pigeaud (1960), di mana kekuasaan Majapahit bersifat pusat ritual (*ritual center*) dengan pengaruh simbolik yang meluas.

Temuan ini memperkuat penelitian Herryadi (2019) dalam lingkup nasional yang menyatakan bahwa entitas politik di kepulauan Nusa Tenggara memiliki otonomi penuh meski berada dalam orbit Majapahit. Secara internasional, hal ini sejalan dengan argumen Geertz (1980) mengenai "Negara Teater," di mana legitimasi lebih utama daripada kontrol teritorial. Dengan demikian, *Kedatuan* di Sumbawa adalah simpul (*node*) aktif, bukan wilayah pasif di pinggiran kekuasaan Jawa.

2. Sejarah Struktural: Evolusi Kedatuan menuju Kesultanan

Analisis terhadap transisi kekuasaan di Sumbawa membuktikan adanya kontinuitas yang kuat. Menggunakan Teori Sejarah Struktural (Sartono Kartodirdjo, 1993), perubahan dari *Kedatuan* ke *Kesultanan* dipahami sebagai proses *longue durée* (jangka panjang). Perubahan ini tidak terjadi seketika karena faktor eksternal, melainkan akibat akumulasi struktur sosial-ekonomi masyarakat Tau Tana Samawa yang sudah hierarkis sejak masa prasejarah.

Hasil ini mendukung tesis Anthony Reid (1988) dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce*, yang menekankan bahwa integrasi perdagangan maritim Asia Timur memicu diferensiasi kekuasaan dan sentralisasi politik di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi *Kesultanan* di Sumbawa adalah hasil "re-artikulasi" struktur lama, bukan penghapusan sistem adat, sebuah fenomena yang juga ditemukan oleh Hägerdal (2017) dalam studinya tentang politik di wilayah kepulauan timur Indonesia.

3. Sirkuit Kekuasaan: Islam sebagai Katalis Institusionalisasi

Melalui Teori Sirkuit Kekuasaan (Stewart Clegg, 1989), penelitian ini menemukan bahwa Islam bertindak sebagai medium baru yang memperluas sirkuit kekuasaan dari basis genealogis-ritual menuju basis hukum dan diplomasi regional. Masuknya pengaruh Gowa-Tallo tidak memutus sirkuit lokal, tetapi justru menstabilkan posisi elit Sumbawa dalam jaringan kekuasaan Nusantara Timur yang lebih kompleks.

Secara komparatif, temuan ini relevan dengan kajian Andaya (2008) mengenai interaksi antar-kerajaan di Indonesia Timur. Andaya menekankan bahwa kekuasaan di wilayah ini bersifat cair dan berbasis pada aliansi strategis. Di Sumbawa, sirkuit kekuasaan Islam memberikan "bahasa politik" baru yang memungkinkan para penguasa lokal bernegosiasi dengan kekuatan besar (Gowa maupun VOC) tanpa kehilangan identitas adatnya.

4. Historiografi Kritis: Menggugat Narasi Sentralistik

Penggunaan Historiografi Kritis dalam penelitian ini berhasil mendekonstruksi bias Jawa-sentris dan kolonial-sentris. Dengan menempatkan sumber lokal seperti tradisi lisan dan manuskrip sejajar dengan catatan Tiongkok dan laporan Eropa, penelitian ini mengembalikan agensi kepada masyarakat Sumbawa.

Hal ini sejalan dengan semangat dekolonisasi sejarah yang diusung oleh Suryadi (2014) dan kritikan Ricklefs (2008) terhadap penulisan sejarah yang mengabaikan dinamika lokal di luar Jawa. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejarah politik Sumbawa memiliki logika internalnya sendiri, memperkaya narasi sejarah nasional Indonesia yang lebih inklusif dan desentralistik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan lima poin fundamental mengenai dinamika politik Pulau Sumbawa. *Pertama*, fondasi kekuasaan Sumbawa berakar pada struktur prasejarah berbasis ritual dan genealogis yang melahirkan *kedatuan* sebagai organisasi politik awal. *Kedua*, integrasi Sumbawa dalam jaringan perdagangan Asia Timur membuktikan bahwa wilayah ini merupakan aktor aktif dalam sirkulasi maritim regional yang memperkuat posisi elite lokal. *Ketiga*, penyebutan wilayah Sumbawa dalam *Nagarakretagama* menegaskan pengakuan eksistensi politik lokal dalam sistem mandala Majapahit, yang bersifat simbolik-relasional alih-alih penaklukan teritorial absolut. *Keempat*, transformasi *kedatuan* menjadi *kesultanan* merupakan proses evolusi sirkuit kekuasaan yang gradual. Islamisasi dan pengaruh Gowa-Tallo tidak menghapus struktur adat, melainkan mereartikulasi institusi lokal ke dalam sistem yang lebih terlembaga. *Kelima*, dengan menerapkan teori mandala, sejarah struktural, dan historiografi kritis, kajian ini menegaskan bahwa sejarah Sumbawa adalah proses adaptif yang didorong oleh agensi lokal. Pendekatan ini berhasil mendekonstruksi narasi Jawa-sentris dan kolonial-sentris, sekaligus menempatkan Sumbawa sebagai subjek historis yang mandiri dalam lintasan sejarah Nusantara.

B. Saran

Rekonstruksi historiografis Sumbawa dari fase kedatuan hingga kemunculan Cumbawa dalam sumber-sumber eksternal menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan multidisipliner, khususnya melalui penguatan kajian terhadap sumber-sumber lokal seperti tradisi lisan, manuskrip adat, dan arsip regional yang selama ini terpinggirkan dalam narasi sejarah arus utama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan sejarah struktural, arkeologi, antropologi, dan filologi guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika internal masyarakat Sumbawa serta mekanisme negosiasi kekuasaan dengan pengaruh eksternal seperti Majapahit dan Gowa-Tallo. Selain itu, penggunaan perspektif historiografi dekolonial perlu terus dikembangkan agar penulisan sejarah Sumbawa tidak lagi terjebak dalam kerangka Jawa-sentris dan kolonial-sentris, melainkan mampu menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses historisnya sendiri. Dengan demikian, kajian-kajian mendatang diharapkan dapat menghasilkan narasi sejarah Sumbawa yang lebih inklusif, kontekstual, dan juga berimbang, serta berkontribusi pada pengayaan historiografi Nusantara secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (2016). Islam dan pembentukan tradisi politik di Indonesia Timur. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(2), 145–160.
- Arifin, K. (2015). Tradisi megalitik dan pengaruh Hindu-Buddha di Nusa Tenggara Barat. *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 33(2), 85–102.
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII–XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bellwood, P. (1997). *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago* (Rev. ed.). Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Clegg, S. R. (1989). *Frameworks of power*. London: Sage Publications.
- Coolhaas, W. P. (Ed.). (1964). *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Cortese, A. (Ed.). (1944). *The Suma Oriental of Tomé Pires: An account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512–1515*. London: The Hakluyt Society.
- De Graaf, H. J. (1970). *South-East Asian Islam to the eighteenth century*. London: Oxford University Press.
- Hägerdal, H. (2012). *Lords of the land, lords of the sea: Conflict and adaptation in early colonial Timor, 1600–1800*. Leiden: KITLV Press.
- Hasanuddin. (2018). Kesultanan Sumbawa dalam dinamika politik lokal dan kolonial. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(1), 89–112.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pigeaud, T. G. T. (1960). *Java in the 14th century: A study in cultural history*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah nasional Indonesia* (Jilid II: Zaman kuno). Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.
- Said, A. (2020). Transformasi kekuasaan tradisional dalam negara modern: Studi Kesultanan Sumbawa. *Jurnal Sejarah Nusantara*, 5(2), 201–218.
- Simanjuntak, T. (2017). Tradisi megalitik dan dinamika budaya Austronesia di Indonesia. *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 35(2), 81–98.
- Suryadi. (2014). *Manuskrip Melayu dan tradisi intelektual Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Szabó, G. (2010). Trading networks and ceramics in eastern Indonesia: Archaeological perspectives. *Asian Perspectives*, 49(2), 258–285.
- Wolters, O. W. (1999). *History, culture, and region in Southeast Asian perspectives* (Rev. ed.). Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program.